



RENCANA KERJA

TAHUN 2025

STASIUN KIPM BANDUNG



KATA PENGANTAR

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM Bandung) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maka Stasiun KIPM Bandung menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI dan ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Bandung Bandung Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2025. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Bandung untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2025 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun KIPM Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2025. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun KIPM Bandung di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Bandung, 14 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Tugas dan Peran Organisasi	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran.....	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi	10
Arah Kebijakan.....	13
Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja.....	13
Penutup.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2024	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2025	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun KIPM Bandung tahun 2025	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Bandung 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus

menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi dipasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun KIPM Bandung sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun KIPM Bandung cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2025.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Bandung dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Bandung adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Bandung tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan

Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-PBPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun KIPM Bandung telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun KIPM Bandung telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bandung TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Stasiun KIPM Bandung	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Bandung (Indeks)	86
		8	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung (Nilai)	75
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
				2024
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	71
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	93,76
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	100
		13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu

antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Stasiun KIPM BPPMHKP tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun KIPM Bandung tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 3.267.279.027,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Bandung untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun KIPM Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.032.289.027
2.	Manajemen Mutu	57.490.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025		3.267.279.027

Penutup

Rencana kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun KIPM Bandung antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BPPMHKP Bandung pada tahun 2025 sebesar **Rp. 3.267.279.027,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 3.032.289.027,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 57.490.000,-**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 177.500.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anak Agung Gede Eka Susila**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Anak Agung Gede Eka Susila

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BANDUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.032.289.027
2.	Manajemen Mutu	57.490.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025		3.267.279.027

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Anak Agung Gede Eka Susila

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
032.13.EC 3989 3989.BIA	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		561,980,000 380,000,000 5,000,000		
3989.BIA.001 051 A	Lokasi : KOTA CIREBON Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	1.0 Produk		5,000,000 5,000,000 5,000,000	U	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon)			320,000	A	PNP
524111	- ATK, penggandaan dan penjiilidan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon)	1.0 PKT	320,000	320,000 3,780,000	* A	PNP
524113	- Uang Harian perjalanan investigasi (3 ORG x 1 HR x 2 LOK x 1 KL) - Satuan biaya transportasi darat (3 ORG x 1 HR x 2 LOK x 1 KL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.024-Cirebon)	6.0 OH 6.0 OK	430,000 200,000	2,580,000 1,200,000 900,000	* * A	PNP
3989.PDC	- Transport lokal investigasi kasus (2 ORG x 1 HR x 3 LOK x 1 KL) Sertifikasi Produk[Base Line]	6.0 OK	150,000	900,000 130,000,000	* U	
3989.PDC.002 051 A	Lokasi : KOTA CIREBON Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan (PNP)	60.0 produk		130,000,000 130,000,000 30,000,000	U	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon)			930,000	2	PNP
524111	- ATK, penggandaan dan penjiilidan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon)	1.0 PKT	930,000	930,000 19,470,000	* A	PNP
524113	- Biaya Penginapan Sosialisasi SPDI di Jakarta - Uang harian Fullboard Sosialisasi SPDI di Jakarta - Transport Perdin Sosialisasi - Uang Harian Sosialisasi SPDI di Jakarta - Uang harian inspeksi/verifikasi (2 ORG x 1 HR x 12 LOK x 1 KL) - Satuan biaya transportasi darat (2 ORG x 1 HR x 12 LOK x 1 KL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.024-Cirebon)	1.0 OH 3.0 OH 1.0 OK 2.0 OH 24.0 OH 24.0 OK	700,000 130,000 1,200,000 530,000 430,000 250,000	700,000 390,000 1,200,000 860,000 10,320,000 6,000,000 9,600,000	* * * * * * A	PNP
B	- Transport lokal (2 ORG x 1 HR x 32 LOK x 1 KL) Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit	64.0 OK	150,000	9,600,000 42,680,000	* U	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29,480,000	A	
	(KPPN.024-Cirebon)					
	> Surveilen UPI Grade A			1,160,000		
	- Uang harian surveilen Grade A (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 1 UPI)	2.0 OH	430,000	860,000	*	
	- Transport surveilen Grade A (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 1 UPI)	2.0 OH	150,000	300,000	*	
	> Surveilen UPI Grade B			28,320,000		
	- Uang harian surveilen Grade B (2 ORG x 1 HR x 2 KL x 5 UPI)	20.0 OH	430,000	8,600,000	*	
	- Transport surveilen Grade B (2 ORG x 1 HR x 2 KL x 5 UPI)	20.0 OK	150,000	3,000,000	*	
	- Biaya penginapan surveilen (Sukabumi, Pelab. Ratu)	8.0 OH	500,000	4,000,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			13,200,000	A	
	(KPPN.024-Cirebon)					
	- Blokir Transport lokal surveilen	56.0 OK	150,000	8,400,000	*	
	- Transport lokal surveilen Grade B satker Cirebon	8.0 OK	150,000	1,200,000		
	- Transport lokal surveilen Grade A (2 ORG x 1 HR x 2 KL x 6 UPI)	24.0 OK	150,000	3,600,000	*	
	C	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)			44,980,000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			38,080,000	A
		(KPPN.024-Cirebon)				
		- Blokir perdin inspeksi/verifikasi HACCP	1.0 THN	7,753,000	7,753,000	*
		- Penginapan inspeksi/verifikasi (Sukabumi, Pelab. Ratu)	10.0 OH	500,000	5,000,000	
- Uang Harian inspeksi/verifikasi (Sukabumi, Pelab. Ratu)		26.0 OH	430,000	11,180,000		
- Uang Harian inspeksi/verifikasi (2 ORG x 1 HR x 6 LOK x 2 KL)		24.0 OH	430,000	10,320,000		
- Satuan biaya transportasi darat		1.0 THN	3,827,000	3,827,000		
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6,900,000	A
(KPPN.024-Cirebon)						
- Transport lokal inspeksi/verifikasi HACCP (2 ORG x 1 HR x 23 LOK x 1 KL)	46.0 OK	150,000	6,900,000	*		
D	Sosialisasi SKP dan SPDI ke UPI			11,740,000		
	Belanja Bahan			11,740,000		
	(KPPN.024-Cirebon)					
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan	1.0 PKT	500,000	500,000		
	- Publikasi di media cetak dan elektronik	1.0 PKT	500,000	500,000		
	- Seminar kit	40.0 OK	150,000	6,000,000		
	- ATK dan komputer supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000		
	- Pencetakan spanduk/leaflet/banner	1.0 PKT	1,140,000	1,140,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT	40.0 OK	20,000	800,000		
	- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT	40.0 OK	45,000	1,800,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Kegiatan Validasi Produksi Pasca Panen Satker Bandung			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.024-Cirebon)			600,000	RM
	- Transport lokal surveilen satker Bandung	4.0 OK	150,000	600,000	
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	30.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		205,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA CIREBON	30.0 Lembaga		205,000,000	
051	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi			205,000,000	U
A	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			8,160,000	
524111	Sertifikasi CPPIB			8,160,000	A RM
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon)				
	- Satuan biaya transportasi darat (2 ORG x 1 HR x 3 LOK x 2 KL)	12.0 OK	250,000	3,000,000	*
	- Uang Harian Audit/Inspeksi/surveilen CBIB (2 ORG x 1 HR x 3 LOK x 2 KL)	12.0 OH	430,000	5,160,000	*
B	Sertifikasi CPIB pada Pembenihan			8,160,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,160,000	A RM
	(KPPN.024-Cirebon)				
	- Satuan biaya transportasi darat (2 ORG x 1 HR x 3 LOK x 2 KL)	12.0 OK	250,000	3,000,000	*
	- Uang Harian Audit/Inspeksi/surveilen CBIB (2 ORG x 1 HR x 3 LOK x 2 KL)	12.0 OH	430,000	5,160,000	*
C	Sertifikasi CBIB pada Pembudidaya Ikan			15,920,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,920,000	A RM
	(KPPN.024-Cirebon)				
	- Penginapan	1.0 OK	400,000	400,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	6.0 OH	430,000	2,580,000	SBM
	- Satuan biaya transportasi darat	1.0 OK	400,000	400,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	8.0 OH	600,000	4,800,000	*
	- Uang Harian audit/inspeksi/surveilen (3 ORG x 2 HR x 2 LOK x 2 KL)	18.0 OH	430,000	7,740,000	*
D	Sertifikasi CPOIB dan CDOIB			18,720,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18,720,000	A PNP
	(KPPN.024-Cirebon)				
	- Biaya Penginapan (2 ORG x 1 KMR x 2 LOK x 2 KL)	8.0 OH	600,000	4,800,000	*
	- Uang Harian Audit/Inspeksi/surveilen (3 ORG x 2 HR x 2 LOK x 2 KL)	24.0 OH	430,000	10,320,000	*
	- Satuan biaya transportasi darat (3 ORG x 1 HR x 2 LOK x 2 KL)	12.0 OK	300,000	3,600,000	*
E	Bimbingan Teknis CPIB Kapal Perikanan			57,120,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Publikasi di media cetak - Pencetakan banner/spanduk/poster - Penggandaan dan penjiilidan laporan - ATK dan komputer supplies - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT - Seminar kit	1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT 40.0 OK 40.0 OK 40.0 OK	1,120,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 50,000 20,000 300,000	18,920,000 1,120,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 800,000 12,000,000	RM SBM SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) - Transport Narasumber Sosialisasi Sertifikasi - Uang Harian Narasumber Sosialisasi Sertifikasi - Transport surveilen Indramayu (2 ORG x 4 LOK) - Uang Harian surveilen Indramayu - Penginapan surveilen Pelabuhan Ratu (2 ORG x 1 KMR x 5 LOK) - Uang Harian surveilen Pelabuhan Ratu (2 ORG x 2 HR x 5 LOK) - Transport surveilen Pelabuhan Ratu (2 ORG x 5 LOK)	1.0 OH 1.0 OK 2.0 OH 8.0 OK 8.0 OH 10.0 OH 20.0 OH 10.0 OK	900,000 1,000,000 430,000 200,000 430,000 600,000 430,000 500,000	27,400,000 900,000 1,000,000 860,000 1,600,000 3,440,000 6,000,000 8,600,000 5,000,000	A * * * * * * * * PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Transport lokal surveilen (2 ORG x 1 HR x 6 LOK x 1 KL)	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	A * PNP
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Transport lokal peserta Sosialisasi Sertifikasi	60.0 OK	150,000	9,000,000 9,000,000	A * RM
F	<i>Bahan Perlengkapan Kegiatan Sertifikasi Mutu Primer</i>			82,120,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Seragam perlengkapan inspeksi (rompi, sepatu, topi)	1.0 PKT	18,000,000	18,000,000	RM
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.024-Cirebon) - Bahan uji laboratorium (PNBP)	1.0 PKT	64,120,000	64,120,000	2 * PNP
G	<i>Kegiatan Validasi Sertifikasi Produksi Primer_Satker Bandung</i>			14,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649732)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 9,210,722,000	

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon) - Seminar kit kegiatan Dialog Percepatan Sertifikasi (45 ORG x 2 KL) - ATK dan komputer supplies - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT kegiatan Dialog Percepatan Sertifikasi (45 ORG x 2 KL) - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT kegiatan Dialog Percepatan Sertifikasi	40.0 OK 2.0 PKT 40.0 OK 40.0 OK	176,000 1,000,000 52,000 22,000	12,000,000 7,040,000 2,000,000 2,080,000 880,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon) - Perjalanan dinas luar kota	2.0 OK	1,400,000	2,800,000	RM
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		25,000,000	
3989.QIA.001	Lokasi : KOTA CIREBON Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	1.0 Produk		25,000,000	
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			25,000,000	U
A	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (PNBP)			25,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon) - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT - ATK, spanduk, penggandaan dan penjilidan - Perlengkapan pendukung pengujian - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT - Biaya pembelian contoh uji (10 TITIK x 2 PERIODE)	40.0 OK 2.0 PKT 2.0 PKT 40.0 OK 20.0 PKT	40,000 750,000 2,500,000 20,000 300,000	14,900,000 1,600,000 1,500,000 5,000,000 800,000 6,000,000	A PNP
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.024-Cirebon) - Biaya pengujian ke lab rujukan	1.0 PKT	4,100,000	4,100,000	A PNP
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.024-Cirebon) - Transport pengambilan contoh uji (3 ORG x 1 HR x 1 KL x 5 LOKASI x 2 PERIODE) - Pendamping lapangan (1 ORG x 1 HR x 1 KL x 5 LOKASI x 2 PERIODE)	30.0 OK 10.0 OK	150,000 150,000	4,500,000 1,500,000	A PNP
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	15.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		15,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA CIREBON UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15.0 Lembaga		15,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			15,000,000	U
A	Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC pada UPI			11,040,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon) - ATK, penggandaan dan penjilidan	1.0 PKT	880,000	880,000	2 PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) - Transport perjalanan dinas - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Uang Harian evaluasi kesesuaian - Transport evaluasi kesesuaian (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 6 UPI)	2.0 OH 1.0 OK 2.0 OH 1.0 OH 8.0 OH 6.0 OK	430,000 800,000 480,000 350,000 430,000 250,000	7,910,000 860,000 800,000 960,000 350,000 3,440,000 1,500,000	A * * * *	RM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) - Transport lokal evaluasi kesesuaian penerbitan HC (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 10 UPI)	5.0 OK 10.0 OK	150,000 150,000	2,250,000 750,000 1,500,000	A *	RM SBM
B	<u>Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC_Satker Bandung</u>			3,960,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1.0 OH	3,210,000	3,210,000		RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	5.0 OK	150,000	750,000 750,000	A	RM SBM
7010	Manajemen Mutu			181,980,000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		7,980,000		
7010.ABR.001	Lokasi : KOTA CIREBON Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	1.0 Rekomendasi Kebijakan		7,980,000		
052	Monitoring Nomor Registrasi UPI ke Negara Mitra			7,980,000	U	
A				7,980,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang Harian (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 3 UPI) - Transport (2 ORG x 1 HR x 1 KL x 3 UPI)	6.0 OH 6.0 OK	430,000 150,000	3,480,000 2,580,000 900,000	A * *	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Transport lokal monitoring	30.0 OK	150,000	4,500,000 4,500,000	A *	PNP
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		7,000,000		
7010.DCC.001	Lokasi : KOTA CIREBON Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		7,000,000		
051	Peningkatan kompetensi inspektur mutu			7,000,000	U	
A	Inhouse Training Inspektur Mutu			7,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649732)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 9,210,722,000	

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) - Uang harian Fullboard - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Transport	2.0 OH 3.0 OH 2.0 OH 1.0 OK	530,000 130,000 700,000 4,000,000	7,000,000 1,060,000 540,000 1,400,000 4,000,000	A * * * *	PNP
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		100,000,000		
7010.PBR.001	Lokasi : KOTA CIREBON Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		100,000,000		U
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			100,000,000		
A	Maintenance ISO 17025			28,900,000		RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Iuran Tahunan KAN (1 TAHUN)	2.0 PKT	1,500,000	3,000,000		
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.024-Cirebon) - Bahan uji laboratorium Cirebon	1.0 PKT	20,180,000	20,180,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Transport asesor - Biaya Penginapan asesor KAN - Uang Harian asesor KAN (2 ORG x 2 HR)	2.0 ORG 2.0 OH 4.0 OH	1,000,000 1,000,000 430,000	5,720,000 2,000,000 2,000,000 1,720,000	A * * *	RM
B	Uji Banding			600,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Uji Banding	1.0 PKT	600,000	600,000		RM
C	Uji Profisiensi			9,000,000		RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Uji Profisiensi	6.0 PKT	1,500,000	9,000,000		
D	Kalibrasi Alat Laboratorium			48,000,000		RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Jasa Kalibrasi alat laboratorium Cirebon	1.0 PKT	48,000,000	48,000,000		
E	Surveiln Tidak Terjadwal ISO 17025 Laboratorium Bandung			13,500,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Penggandaan dan penjiilidan dokumen ISO 17025 - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT - ATK dan komputer supplies dokumen ISO 17025	1.0 PKT 10.0 OK 10.0 OK 2.0 PKT	900,000 20,000 40,000 1,000,000	3,500,000 900,000 200,000 400,000 2,000,000	RM SBM SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.024-Cirebon) - Bahan pendukung pengujian laboratorium Bandung	1.0 PKT	6,500,000	6,500,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Surveiln ISO 17025	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	RM
7010.PDD	<u>Standarisasi Lembaga[Base Line]</u>	2.0 Lembaga, Unit Kerja		60,000,000	
7010.PDD.001	Lokasi : KOTA CIREBON Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000	U
A	<i>Penerapan Standar Metode Pengujian Laboratorium Bandung</i>			25,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Jasa Kalibrasi alat laboratorium Bandung - Iuran Tahunan KAN	1.0 PKT 1.0 PKT	23,500,000 1,500,000	23,500,000 1,500,000	RM
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		35,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			35,000,000	U
A	<i>Reakreditasi ISO 17020</i>			35,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Bahan perlengkapan witness (sarung tangan kain, sepatu boot dll)	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya pertanggunggugatan	1.0 PKT	820,000	820,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya permohonan asesmen ulang - Reakreditasi ISO 17020 (2 ORG x 3 HR), witness	1.0 PKT 5.0 PKT	5,000,000 3,500,000	5,000,000 17,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang harian Asesor KAN (2 ORG x 3 HR) - Penginapan (2 ORG x 2 HR) - Transport	6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK	430,000 900,000 1,000,000	2,580,000 3,600,000 2,000,000	A * *

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649732)

Rp. 9,210,722,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		7,000,000		
7010.QIA.001	Lokasi : KOTA CIREBON					
051	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		7,000,000		
A	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			7,000,000	U	
524111	Rapat Koordinasi Quality Assurance (di Bali)			7,000,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			7,000,000	A	PNP
	(KPPN.024-Cirebon)					
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)	2.0 OH	530,000	1,060,000	*	
	- Uang harian Fullboard	4.0 OH	130,000	520,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA)	2.0 OH	700,000	1,400,000	*	
	- Transport	1.0 OK	4,020,000	4,020,000	*	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			8,648,742,000		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			8,648,742,000		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		8,588,262,000		
3987.EBA.962	Lokasi : KOTA CIREBON					
051	Layanan Umum	1.0 Layanan		114,030,000		
A	Layanan Umum dan Rumah Tangga			114,030,000	U	
	Pengelolaan umum			60,420,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649732)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 9,210,722,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) (3 ORG x 2 HR x 4 KL) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Transport > Konsultasi ke Kanwil Perbendaharaan Jawa Barat > Bimtek Perbendaharaan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Transport (2 ORG x 1 KL) > Pengelolaan Kepegawaian - Uang harian (1 ORG x 3 HR x 2 KL) - Penginapan (1 ORG x 2 HR x 2 KL) - Transport > Pengelolaan Fungsional - Uang harian (1 ORG x 3 HR x 2 KL) - Penginapan (1 ORG x 2 HR x 2 KL) - Transport	24.0 OH 8.0 OH 12.0 OK 8.0 OH 6.0 OH 2.0 OK 6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK 6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK	430,000 600,000 400,000 530,000 700,000 1,000,000 530,000 700,000 4,000,000 530,000 700,000 4,000,000	58,320,000 10,320,000 4,800,000 4,800,000 33,900,000 10,440,000 4,240,000 4,200,000 2,000,000 13,980,000 3,180,000 2,800,000 8,000,000 13,980,000 3,180,000 2,800,000 8,000,000	A * * * * * * * * * * * *	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.024-Cirebon) - Transport pengelola keuangan kantor Cirebon	14.0 OK	150,000	2,100,000 2,100,000	A	RM
B	<u>Pengelolaan Rumah Tangga</u>			40,930,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Penggandaan dan penjiilidan dokumen pengadaan - Pencetakan box arsip	1.0 THN 200.0 Unit	6,740,000 25,000	11,740,000 6,740,000 5,000,000	A * *	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.024-Cirebon) > Penilaian Mandiri SAKIP dan Maintenance WBK - Uang harian > Bimtek Pengelolaan Arsip > Rekonsiliasi Triwulanan ke UAKPA-W - Uang harian (3 ORG x 1 HR x 3 KL) > Penyusunan RK BMN > Rekonsiliasi Semesteran - Uang harian - Uang harian (3 ORG x 4 HR x 2 KL) - Penginapan (2 ORG x 3 HR x 2 KL) - Transport	1.0 OH 1.0 OH 4.0 OH 28.0 OH 10.0 OH 1.0 OK	430,000 430,000 3,160,000 3,160,000 2,000,000 25,600,000 370,000 530,000 850,000 780,000	29,190,000 430,000 430,000 1,000,000 3,160,000 3,160,000 2,000,000 25,600,000 1,480,000 14,840,000 8,500,000 780,000	A	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649732)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 9,210,722,000	

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Pengelolaan Data dan Informasi			6,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.024-Cirebon)			6,000,000	RM
	- Leaflet/brosur	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
D	Kegiatan Layanan Umum dan Rumah Tangga Satker Bandung			6,680,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon)			5,780,000	RM
	> Perjalanan Dinas Keuangan			5,780,000	
	- Uang harian (1 ORG x 3 HR x 2 KL)	8.0 OH	430,000	3,440,000	
	- Penginapan (1 ORG x 2 HR x 2 KL)	4.0 OH	585,000	2,340,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.024-Cirebon)			900,000	RM
	- Transport pengelola keuangan kantor Bandung	6.0 OK	150,000	900,000	
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		8,474,232,000	
001	Gaji dan Tunjangan			6,482,711,000	U
A	Gaji dan Tunjangan PNS			6,040,111,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.024-Cirebon)			2,081,158,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,781,158,000	1,781,158,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	150,000,000	150,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	150,000,000	150,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.024-Cirebon)			54,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34,000	34,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,000	10,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	10,000	10,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.024-Cirebon)			166,800,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	142,800,000	142,800,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,000,000	12,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,000,000	12,000,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.024-Cirebon)			63,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	54,000,000	54,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,500,000	4,500,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,500,000	4,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	21,000,000 1,750,000 1,750,000	24,500,000 21,000,000 1,750,000 1,750,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	80,000,000 4,000,000 4,000,000	88,000,000 80,000,000 4,000,000 4,000,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	124,000,000	124,000,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	325,000,000	325,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	53,600,000 4,450,000 4,450,000	62,500,000 53,600,000 4,450,000 4,450,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang lembur pegawai Golongan II (2 ORG x 5 JAM x 3 HR x 12 BLN) - Uang lembur pegawai Golongan IV (4 ORG x 8 JAM x 4 HR x 12 BLN) - Uang lembur pegawai Golongan III (12 ORG x 8 JAM x 4 HR x 12 BLN) - Uang makan lembur pegawai Golongan II (2 ORG x 3 HR x 12 BLN) - Uang makan lembur pegawai Golongan IV (4 ORG x 4 HR x 12 BLN) - Uang makan lembur pegawai Golongan III (12 ORG x 4 HR x 12 BLN)	360.0 OJ 1536.0 OJ 4608.0 OJ 72.0 OJ 192.0 OJ 576.0 OJ	24,000 36,000 30,000 35,000 41,000 37,000	233,880,000 8,640,000 55,296,000 138,240,000 2,520,000 7,872,000 21,312,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.024-Cirebon) - Tunjangan kinerja	1.0 THN	2,851,219,000	2,851,219,000	RM
B	<u>Gaji dan Tunjangan PPPK</u>			442,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja gaji pokok PPPK - Belanja gaji PPPK Paruh Waktu	1.0 THN 1.0 THN	121,480,000 130,000,000	251,480,000 121,480,000 130,000,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja pembulatan gaji	1.0 THN	20,000	20,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja tunjangan suami/istri PPPK	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja tunjangan anak PPPK	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja tunjangan beras PPPK	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang Makan PPPK (11 ORG x 3 BLN)	3.0 BLN	8,700,000	26,100,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Belanja tunjangan umum PPPK	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Uang lembur PPPK (11 ORG x 3 BLN)	3.0 BLN	5,500,000	16,500,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.024-Cirebon) - Tunjangan Kinerja PPPK (11 ORG x 3 BLN)	3.0 BLN	45,000,000	135,000,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,991,521,000	U
A	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>267,220,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.024-Cirebon) - Langganan internet Bandung - Langganan internet Cirebon - Biaya langganan hosting Jesika Mobil	12.0 BLN 12.0 BLN 1.0 THN	3,400,000 3,800,000 6,700,000	93,100,000 40,800,000 45,600,000 6,700,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya pengiriman surat Cirebon - Biaya pengiriman surat Bandung	12.0 BLN 12.0 BLN	200,000 100,000	3,600,000 2,400,000 1,200,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.024-Cirebon) - Langganan listrik Cirebon - Langganan listrik Bandung	12.0 BLN 12.0 BLN	10,850,000 2,000,000	154,200,000 130,200,000 24,000,000	A	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.024-Cirebon) - Langganan telepon Cirebon - Langganan telepon Bandung	12.0 BLN 12.0 BLN	560,000 500,000	12,720,000 6,720,000 6,000,000		
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.024-Cirebon) - Langganan air Cirebon	12.0 BLN	150,000	1,800,000 1,800,000	A	RM
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Gas dan LPG Bandung	12.0 BLN	150,000	1,800,000 1,800,000		
B	<i>Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4</i>			128,579,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya perpanjangan STNK	7.0 UNIT	2,100,000	14,700,000 14,700,000	A	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat) Bandung - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Jawa Barat) Bandung - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat) Cirebon	2.0 UNIT 1.0 UNIT 4.0 UNIT	13,000,000 13,079,000 18,700,000	113,879,000 26,000,000 13,079,000 74,800,000		
C	<i>Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2</i>			23,500,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya perpanjangan STNK	10.0 UNIT	350,000	3,500,000 3,500,000	A	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.024-Cirebon) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Barat)	10.0 UNIT	2,000,000	20,000,000 20,000,000		
D	<i>Pemeliharaan Gedung Kantor</i>			187,869,000		
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.024-Cirebon) - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Cihanjuang - Pembuatan Logo Instansi Kantor Cirebon - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kantor Cirebon - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Kantor Bandung	1245.0 M2 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	11,000 9,600,000 88,442,000 76,132,000	187,869,000 13,695,000 9,600,000 88,442,000 76,132,000	A	RM
E	<i>Operasional Perkantoran</i>			225,453,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.024-Cirebon) - Langganan canva/google drive/zoom meeting kantor Cirebon - Lisensi Software/Biaya Hosting/Zoom kantor Bandung keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai Kantor Cirebon (Jawa Barat) - keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai Kantor Bandung (Jawa Barat)	1.0 THN 1.0 THN 1.0 STKR 1.0 STKR	4,000,000 1,000,000 60,000,000 35,713,000	100,713,000 4,000,000 1,000,000 60,000,000 35,713,000	A <

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon)			34,300,000	A RM
	- Pakaian dinas ASN Kantor Cirebon (28 PEG x 1 STEL)	28.0 STEL	600,000	16,800,000	
	- Pakaian kerja PPNPN Kantor Cirebon (13 ORG x 1 STEL)	13.0 STEL	500,000	6,500,000	
	- Pakaian kerja PPNPN Kantor Bandung (10 ORG x 1 STEL)	10.0 STEL	500,000	5,000,000	
	- Pakaian dinas ASN Kantor Bandung (10 PEG x 1 STEL)	10.0 STEL	600,000	6,000,000	
G	<u>Honor Tenaga PPNPN dan Jasa Lainnya</u>			970,700,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.024-Cirebon)			440,300,000	A RM
	- Honor Tenaga PPNPN Cirebon yang terdaftar di Database BKN (4 ORG x 11 BLN)	44.0 BLN	3,300,000	145,200,000	
	- Honor Tenaga PPNPN Bandung yang terdaftar di Database BKN (7 ORG x 11 BLN)	77.0 BLN	3,400,000	261,800,000	
	- BPJS Ketenagakerjaan	1.0 THN	33,300,000	33,300,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.024-Cirebon)			530,400,000	RM
	- Honor PJLP kantor Cirebon (9 ORG x 13 BLN)	1.0 THN	397,800,000	397,800,000	
	- Honor PJLP kantor Bandung (3 ORG x 13 BLN)	1.0 THN	132,600,000	132,600,000	
H	<u>Perbaikan Peralatan Kantor</u>			30,700,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.024-Cirebon)			30,700,000	A RM
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Kantor Cirebon	2.0 UNIT	600,000	1,200,000	SBM
	- Pemeliharaan Access Point Kantor Cirebon	1.0 PKT	9,100,000	9,100,000	
	- Pemeliharaan AC Split Kantor Cirebon	30.0 UNIT	400,000	12,000,000	
	- Pemeliharaan AC Split Kantor Bandung	14.0 UNIT	600,000	8,400,000	
J	<u>Jamuan Makan</u>			57,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.024-Cirebon)			57,000,000	RM
	- Jamuan makan Kantor Cirebon	12.0 BLN	3,000,000	36,000,000	
	- Jamuan makan Kantor Bandung	12.0 BLN	1,750,000	21,000,000	
L	<u>Sewa Gedung Arsip</u>			55,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.024-Cirebon)			55,000,000	RM
	- Biaya sewa gedung arsip	1.0 THN	55,000,000	55,000,000	
M	<u>Operasional perkantoran Bandung</u>			11,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.024-Cirebon)			10,000,000	RM
	- Alat tulis kantor rutin dan pelayanan publik kantor Bandung	6.0 BLN	1,000,000	6,000,000	
	- Bahan sanitasi pendukung pengujian laboratorium Bandung	4.0 BLN	1,000,000	4,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649732) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 9,210,722,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.024-Cirebon)			1,200,000	RM
3987.EBD	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Kantor Bandung	2.0 UNIT	600,000	1,200,000	SBM
	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		60,480,000	
3987.EBD.952	Lokasi : KOTA CIREBON Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		23,280,000	
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			23,280,000	U
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			2,480,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon)			2,480,000	A PNP
	- ATK dan komputer supplies	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	*
	- Penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	480,000	480,000	*
C	Perjalanan kordinasi/konsultasi			20,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.024-Cirebon)			20,800,000	A RM
	- Uang Harian	4.0 OH	260,000	1,040,000	SBM
	> Koordinasi ke satker Bandung			9,850,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) (2 ORG x 1 HR x 6 KL)	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	- Transport	1.0 OK	4,690,000	4,690,000	
	> Perjalanan pimpinan			9,910,000	
	- Uang harian (1 ORG x 4 HR x 2 KL)	8.0 OH	530,000	4,240,000	
	- Penginapan (1 ORG x 3 HR x 2 KL)	6.0 OH	700,000	4,200,000	
	- Transport	1.0 OK	1,470,000	1,470,000	
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		37,200,000	
051	Layanan Manajemen Keuangan			37,200,000	
A	Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			37,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.024-Cirebon)			9,040,000	A PNP
	- ATK dan komputer supplies	2.0 PKT	770,000	1,540,000	*
	- Penggandaan dan penjiilidan manual IKU	5.0 PKT	500,000	2,500,000	*
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan kinerja (tahunan dan triwulanan)	5.0 PKT	500,000	2,500,000	*
	- Penggandaan dan penjiilidan rencana aksi kegiatan	5.0 PKT	500,000	2,500,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649732)

Rp. 9,210,722,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			28,160,000	A	PNP
	(KPPN.024-Cirebon)					
	> Penyusunan MR			28,160,000		
	- Uang harian (4 ORG x 1 HR x 2 KL)	8.0 OH	530,000	4,240,000	*	
	- Uang harian fullboard (4 ORG x 3 HR x 2 KL)	24.0 OH	130,000	3,120,000	*	
	- Penginapan (4 ORG x 2 HR x 2 KL)	16.0 OH	800,000	12,800,000	*	
	- Transport	8.0 OK	1,000,000	8,000,000	*	